

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persebaran Layanan Pendidikan

Persebaran sekolah disuatu wilayah berkaitan dengan lokasi. Keberadaan sekolah yang tepat akan memperkuat pelayanan terhadap peserta didik dan pemerataan pendidikan. Pada jenjang SMA di suatu wilayah dibangun berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah (16-18) tahun dan daya tampung sekolah. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 tahun 2007 tentang batas maksimum jumlah penduduk yang dilayani, dan area pelayanan fasilitas satuan pendidikan SMA. Menurut standar ini Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru (Permendikbud No 24, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas, persebaran lokasi sekolah merupakan letak sekolah yang keberadaannya disesuaikan dengan kebutuhan penduduk untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Indikator persebaran sekolah adalah lokasi sekolah. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber potensial terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun social (Tarigan,2006). Hagget dalam Hargito mengemukakan bahwa lokasi merupakan tempat dalam suatu

ruang yang dapat di deskripsikan dalam bentuk lokasi absolut dan lokasi relatif (Hargito, 2009:41).

Teori Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam suatu wilayah. Menurut Christaller, pusat pelayanan tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon (segi enam). Christaller menulis buku yang berjudul *Central Places in Southern Germany* yang isinya menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam suatu wilayah. Model Christaller yaitu suatu sistem geometri angka 3 yang diterapkan secara arbiter memiliki peran sangat penting. Itulah sebabnya disebut sistem $K=3$ dari Christaller (Tarigan, 2005).

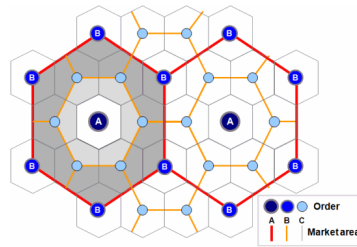
Rohe W mengemukakan dalam Hargito bahwa secara teoritis, ada dua faktor yang menurut Christaller dianggap berpengaruh terhadap jumlah, luas dan tingkat kepusatan (*central place*), yakni setiap pusat hirarki pasti memiliki dua hal, yaitu:

1. Batas ambang penduduk (*threshold population*) adalah minimum jumlah penduduk yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pelayanan suatu pusat sentral, atau minimum penduduk yang diperlukan untuk kelancaran supply barang dan jasa. Jumlah penduduk pendukung minimum suatu sarana akan berbeda untuk jumlah penduduk pendukung antar setiap jenis sarana.
2. Jangkauan pasar (*range of a good*) adalah jarak maksimal area suatu pelayanan terhadap lokasi antara tempat tinggal penduduk dengan lokasi

tempat mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan, dimana penduduk masih bersedia menempuhnya. Lebih jauh dari jarak yang tersebut, mereka akan mengalihkan atau mencari tempat lain. Jadi jangkauan (*range*) merupakan jarak dari suatu tempat pelayanan dimana demand telah menjadi nol. Jarak jangkauan untuk suatu sarana akan berbeda dengan jarak jangkauan dari sarana lainnya tergantung pada jenis barang dan jasa yang dipasarkannya (Hargito, h:30-31).

Model Christaller tentang terjadinya area perdagangan heksagonal (Christaller, 1933) adalah sebagai berikut :

1. Mula-mula terbentuk
2. Areal perdagangan suatu komoditas berbentuk lingkaran. Setiap lingkaran menggambarkan *threshold* dari komoditas tersebut.
3. Kemudian digambarkan lingkaran-lingkaran berupa *range* dari komoditas tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih.
4. *Range* yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga berbentuk areal yang heksagonal menutupi seluruh daratan yang tidak tumpang tindih.
5. Tiap barang berdasarkan tingkat ordenya memiliki heksagonal sendiri-sendiri.



Gambar 2.1 *Central Place Theory*

Secara hierarki *Central Place Theory* dibagi menjadi 3 (tiga) menurut jenis-jenis pusat/ tingkatan pelayanan (dalam *Central Place Theory, 1933*), yaitu:

1. Hierarki K 3

Hierarki 3 sering disebut sebagai kasus pasar optimal yang memiliki pengaruh 1/3 bagian dari wilayah tetangga di sekitarnya yang berbentuk heksagonal, selain memengaruhi itu sendiri.

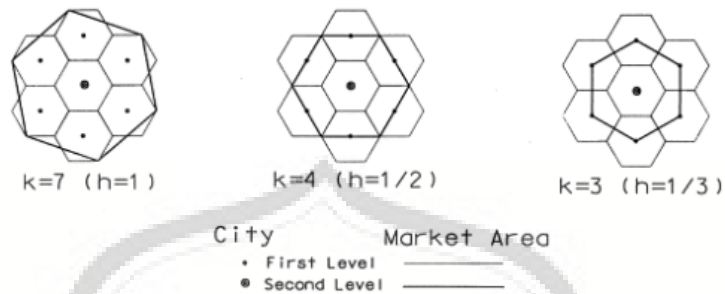
2. Hierarki K 4

Tempat sentral yang berhierarki 4 dinamakan situasi lalu lintas yang optimum, artinya di daerah tersebut dan daerah-daerah di sekitarnya yang terpengaruh tempat sentral itu senantiasa memberikan kemungkinan rute lalu lintas yang paling efisien. Situasi lalu lintas optimum ini memiliki pengaruh 1/2 bagian dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya yang berbentuk segi enam selain memengaruhi wilayah itu sendiri.

3. Hierarki K 7

empat sentral yang berhierarki 7 dinamakan situasi administrative yang optimum. Tempat sentral ini mempengaruhi seluruh bagian (satu

bagian) wilayah-wilayah tetangganya, selain mempengaruhi wilayah itu sendiri.



Gambar 2.2 Hierarki *Central Place Theory*

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa teori lokasi sebagai ilmu yang mengkaji keruangan secara geografis yang memiliki keterkaitan atau pengaruh dengan tempat aktivitas ekonomi maupun sosial. Salah satunya adalah teori lokasi Walter Christaller. Dengan demikian teori lokasi dapat digunakan dalam mengkaji suatu lokasi sebagai aktivitas ekonomi maupun tempat pelayanan sosial.

B. Ketersediaan Layanan Pendidikan

Layanan pendidikan dapat berkembang dengan pesat apabila diukur dengan daya tampung yang masih jauh ketinggalan. Layanan pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sekolah dan proses pembelajaran. Lingkungan yang nyaman mempengaruhi peserta didik untuk belajar di sekolah. Pendidikan menjadi salah satu perhatian yang dilihat bagaimana akses pemerataan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Ketersediaan layanan pendidikan merupakan pemerataan pendidikan dalam perluasan kesempatan belajar.

Pendidikan dicapai untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2005. Pendidikan harus memenuhi standar nasional pendidikan sesuai yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kualitas pendidikan pada Lembaga pendidikan ditunjukkan dengan adanya indikator layanan pendidikan yang memadai dalam proses pendidikan. Ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan SMA mengacu pada standar satuan pendidikan SMA/MA adalah Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar (Permendikbud No. 24, 2007).

Dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 pasal 18 dijelaskan bahwa pendidikan menengah yaitu :

1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan
3. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah(MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

Berdasarkan salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, ketentuan standar sarana dan prasarana

yang diatur meliputi satuan pendidikan, luas lahan, bangunan gedung, dan fasilitas pendidikannya. Standar sarana dan prasarana satuan pendidikan SMA/MA adalah sebagai berikut :

1. Satu SMA/MA memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
2. Minimum satu SMA/MA disediakan untuk satu kecamatan.
3. Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa dan untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru (Pemendikbud No.24, 2007).

C. Sekolah Menengah Atas (SMA)

SMA merupakan jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan pengkhususan. (Depdiknas, 2004: 112). Perwujudan pengkhususan tersebut berupa diselenggarakannya penjurusan di mulai di kelas XI (sebelas), yakni, penjurusan pada Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa yang mulai diterapkan pada siswa SMA kelas XI tahun pelajaran 2005/2006. Penjurusan merupakan upaya strategis dalam memberikan fasilitas kepada siswa untuk menyalurkan bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya yang dianggap paling potensial untuk

dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu maka, sekolah, guru, dan petugas Bimbingan Konseling (BK) harus mampu menempatkan ke dalam jurusan secara tepat. Menempatkan siswa pada jurusan tertentu secara tepat berarti memberikan peluang kepada siswa untuk dapat berhasil pada masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, bahwa Peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Untuk menghindari kemungkinan terjadi ketidaktepatan penjurusan siswa SMA dalam pilihan jurusan tertentu, perlu ada upaya antara lain: pengukuran dan penilaian keefektifan perencanaan penjurusan, keefektifan pelaksanaan penjurusan, keberhasilan siswa setelah penjurusan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penjurusan.

Berdasarkan standar satuan pendidikan SMA/MA adalah satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 48 rombongan belajar dalam satu rombongan belajar dengan jumlah maksimum 36 peserta didik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemendikbud tahun 2021, jumlah Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Purbalingga sejumlah 16 sekolah yang berada di 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data dari Kemendikbud Tahun 2021, jumlah Sekolah Menengah Atas yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah Kecamatan yang memiliki jumlah sekolah terbanyak adalah Kecamatan Purbalingga dengan jumlah 3 unit sekolah. Berikut adalah tabel jumlah Sekolah Menengah Atas Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga :

Tabel 2. 1 Sampel Penelitian SMA di Kabupaten Purbalingga

Kecamatan	Jumlah Sekolah Menengah Atas Tahun 2021 Kabupaten Purbalingga	
	SMA Negeri	SMA Swasta
Kemangkön	1	-
Bukateja	1	-
Kejobong	1	-
Pengadegan	-	-
Kaligondang	-	-
Purbalingga	2	1
Kalimanah	-	1
Padamara	1	-
Kutasari	1	-
Bojongsari	-	-
Mrebet	-	-
Bobotsari	1	1
Karangreja	1	-
Karang Jambu	-	-
Karanganyar	-	1
Kertanegara	-	1
Karangmoncol	-	1
Rembang	1	0
Kabupaten Purbalingga	10	6

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Pelayanan pendidikan harus di dukung oleh fasilitas pendidikan yang dapat menjangkau dan melayani seluruh penduduk dengan merata. Letak suatu sekolah harus berada di suatu lokasi yang baik. Peraturan pemerintah dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai mana yang tercantum dalam UUD 1945, dan diatur dalam peraturan pemerintah, sedangkan pelaksanaan program pendidikan dilakukan dalam sistem

pendidikan nasional”. Jumlah penduduk yang terus meningkat akan menyebabkan berbagai masalah salah satunya adalah jalur akses menuju sekolah kurang, Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas pelayanan pendidikan.

D. Kebijakan sistem zonasi sekolah

Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) diatur dalam permendikbud No. 14 tahun 2018 yang menyatakan bahwa sekolah wajib menerima paling sedikit 90% siswa yang berdomisili di zona sesuai ketentuan pemerintah daerah. Hal ini berarti sekolah menerima siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah (Mandic,et.al., 2017:1). Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk seluruh warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya (Permendikbud No. 44, 2019).

Dalam Permendikbud ini juga diatur jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dengan tujuan utama menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ketentuan Permendikbud tersebut diatur sebagai upaya efektivitas proses pembelajaran yang diharapkan dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar yang sesuai dengan Permendikbud maka proses pembelajaran dapat berjalan efektif. Jumlah Rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar berdasarkan satuan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Indikator standar proses

NO	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah maksimum Peserta Didik Per rombongan Belajar
1.	SD/MI	6-24	28
2.	SMP/MTs	3-33	32
3.	SMA/MA	3-36	36
4.	SMK	3-72	36

Sumber : Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses

Zonasi pendidikan merupakan strategi pembangunan pendidikan dilakukan secara vertikal dari satuan pendidikan, pemerintah/kota, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat dengan lingkup kewenangannya masing-masing.

E. Penelitian Relevan

Tabel 2. 3 Perbandingan Penelitian

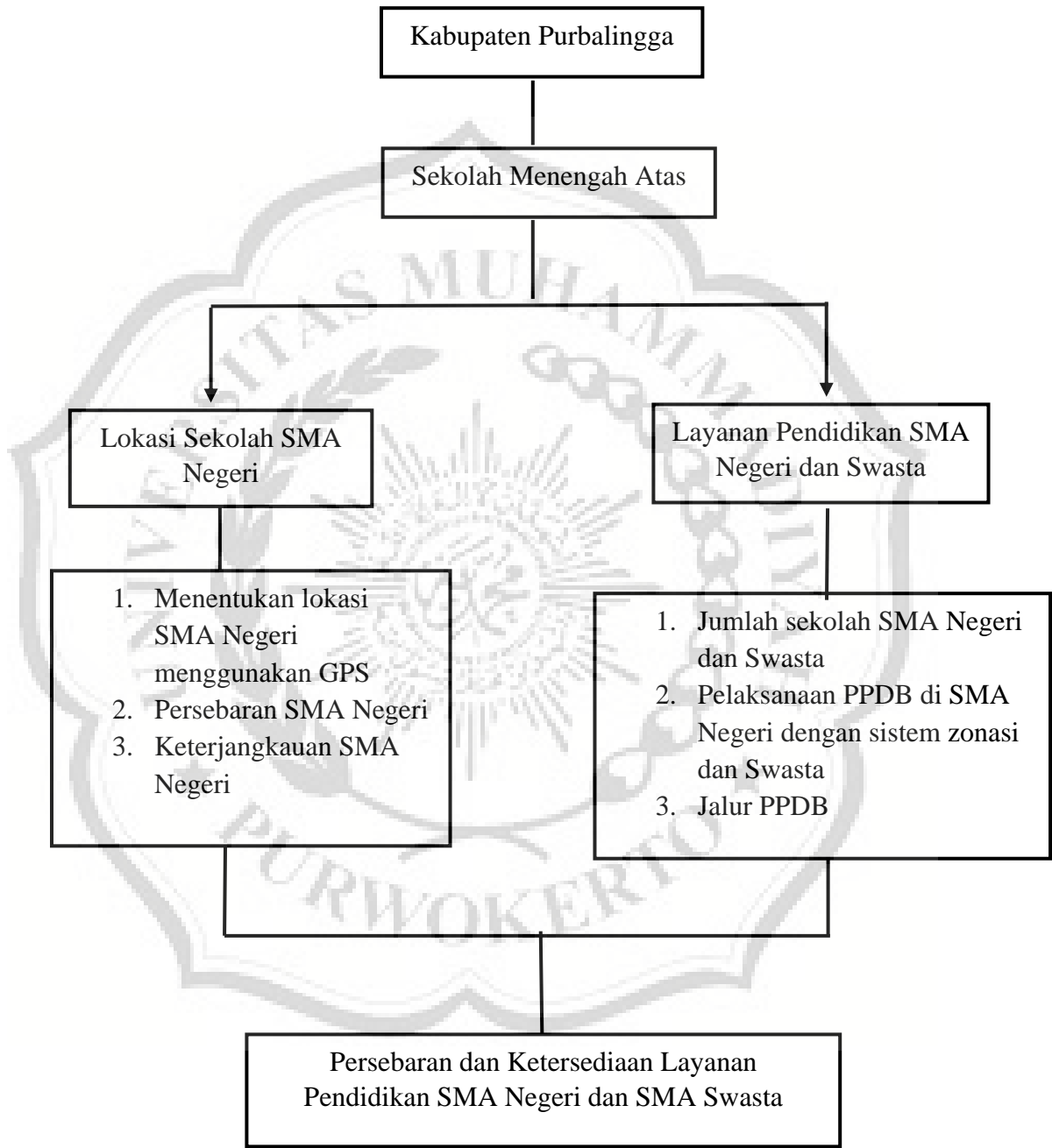
NO	Penulis dan judul	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis kebutuhan dan sebaran fasilitas pendidikan tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Tambrauw	Tujuan penelitian ini adalah Mengevaluasi Ketersediaan fasilitas pendidikan SMP dan SMA berdasarkan hasil kajian dari tingkat pelayanan fasilitas pendidikan dan jarak jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan.	Metode penelitian yang digunakan adalah Teknik analisis, evaluasi terhadap pola distribusi fasilitas pendidikan SLTP dan SLTA yang dilakukan dengan analisis, yaitu menganalisis Ketersediaan dan Sebaran fasilitas pendidikan	Berdasarkan analisis terhadap penyediaan fasilitas pendidikan SMP dan SMA di Kabupaten Tambrauw belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan penduduknya serta belum dapat menjangkau seluruh wilayah ini dari tingkat efisiensi dan efektifitas.
2.	Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pendidikan SLTP Di Kecamatan Mapanget (Orvans Lexsi Uang, Michael M.Rengkung, dan Amanda S.Sembel)	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan yang terdapat di Kecamatan Mapanget dan mengevaluasi kebutuhan dan jangkauan fasilitas Pendidikan SLTP dengan	Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dibutuhkan adalah data demografi penduduk persebaran sekolah, sebagai pendukung jarak jangkauan pelayanan setiap sekolah.	Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Mapanget rata-rata hasil penilaiannya adalah cukup dan kurang dalam pemenuhan kebutuhan, daya tampung, sehingga ketersediaan fasilitas pendidikan di setiap Kecamatan Mapanget belum optimal.

		Standar Pelayanan Minimum (SPM).		
3.	Analisis Persebaran dan Radius Keruangan Pencapaian Maksimal Fasilitas Sekolah Dasar Kecamatan Bukateja (Sakinah Fathrunnadi Shalihati dan Anang Widhi Nirwansyah)	Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mendeskripsikan persebaran secara keruangan (spasial) fasilitas sekolah dasar Kecamatan Bukateja.	Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran situasi secara faktual mengenai faktor-faktor yang saling terkait.	Hasil penelitian ini adalah fasilitas sekolah dasar di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sejumlah 40 sekolah dasar, dengan rincian 4 Sekolah Dasar Swasta dan 36 Sekolah Dasar Negeri.
4.	Analisis Persebaran dan Ketersediaan Layanan Pendidikan SMA Di Kabupaten Purbalingga Ditinjau dari Kebijakan Sistem Zonasi (Fanda Astrianingrum)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran dan ketersediaan layanan pendidikan SMA di Kabupaten Purbalingga	Metode yang digunakan adalah dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.	-

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah salah satu cara untuk mempermudah suatu penelitian yang isinya berupa gambaran yang akan di teliti dilapangan. Penelitian ini berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB, kriteria utama dalam penerimaan siswa adalah zonasi atau jarak antara rumah dengan sekolah. Penerapan sistem zonasi merupakan salah satu upaya pemerataan kualitas pendidikan dapat berjalan dengan baik. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten yang menerapkan kebijakan zonasi pada sekolah tingkat SMA. Dalam sistem ini, sekolah yang sudah di tetapkan oleh pemerintah wajib menerima paling sedikit 50% dari jumlah seluruh peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat.

Permasalahan sistem zonasi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Purbalingga adalah belum terpenuhinya jumlah peserta didik pada beberapa SMA di Kabupaten Purbalingga meskipun sudah di lakukan pembagian zonasi untuk setiap sekolah yang ada. Dengan mengangkat tema tersebut maka peneliti Menyusun alur pikir penelitian yang tersaji dalam gambar 2.2 sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir